



G20

SOUTH AFRICA 2025

Foto: Dok. GSMN.co.za



Krisis Utang Membayangi Pertemuan G20

*Catatan Kritis INFID pada KTT G20
Afrika Selatan 2025*



November 2025

infid.org



Analisis Ringkas INFID #2

KRISIS UTANG MEMBAYANGI PERTEMUAN G20

*Catatan Kritis INFID pada KTT G20 Afrika
Selatan 2025*

Penulis Utama:

Siti Khoirun Ni'mah, Executive Director INFID

infid.org

Tulisan ini adalah bagian dari upaya advokasi **#CloseTheGap** untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Advokasi ini dituangkan melalui narasi-narasi kritis berbasis bukti mengenai isu ketimpangan di Indonesia. Harapannya, kajian singkat ini bisa berguna sebagai bahan kampanye, pemahaman bersama, atau poin-poin diskusi di antara staf INFID, anggota, dan jaringan.

Tulisan ini **boleh dikutip** dalam riset atau dokumen lainnya.

RINGKASAN

Tingginya beban utang dengan nilai dua kali lipat dibandingkan dengan dekade sebelumnya, ditambah beratnya beban bunga akibat mahal biaya kapital menimbulkan kekhawatiran akan munculnya krisis keuangan. Utang bukan lagi menjadi ancaman baru atas tatanan ekonomi dan keuangan global, namun menjadi sumber kemiskinan dan ketimpangan yang dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Situasi ini membayangi pertemuan G20 tahun ini, yang mana relevansi G20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional menjadi pertarungan akan keseriusan G20 memecahkan masalah ketimpangan global.



Keterangan: Aksi protes diadakan di kota-kota utama di enam negara Asia menjelang pertemuan puncak G20 2023 (8/9/2023). (Foto: APMDD)

PENDAHULUAN

G20 dan Kemimpinan Negara Selatan

Pertemuan puncak G20^[1] tahun ini akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Pertemuan tahun ini akan menandai berakhirnya putaran pertama G20, dan akan kembali pada putaran baru yang dimulai dari Presidensi Amerika Serikat di tahun depan. Sekaligus menandai berakhirnya kepemimpinan Selatan yaitu Indonesia, India, Brazil, dan Afrika Selatan di G20 dalam empat tahun terakhir (2022 – 2025).

Kepemimpinan Selatan dalam empat tahun ini membawa beberapa agenda penting yang selama ini menjadi perhatian negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Beberapa di antaranya adalah desakan agar arsitektur kesehatan global lebih adil dengan memberikan akses negara-negara berpendapatan menengah dan rendah untuk dapat mengembangkan manufaktur dan akses teknologi vaksin dibahas secara mendalam di Presidensi Indonesia (2022). Kemudian, pentingnya pajak orang kaya yang sebagai salah satu solusi mengatasi ketimpangan global di Presidensi Brazil (2024), juga desakan reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional terutama Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang mengemuka sejak 2009 dan hingga saat ini belum memberikan perubahan yang berarti. Demikian halnya dengan kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan dari beban utang yang kian berat, sehingga G20 membentuk *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI), sebuah inisiatif menangguhkan pembayaran utang pokok dan bunga untuk 76 negara berpendapatan rendah di tahun 2020.



Keterangan:

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

[1] Sebuah forum utama kerjasama ekonomi global yang berdiri sejak tahun 1999 dan berkembang menjadi forum tingkat tinggi di tahun 2009 untuk merespon krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2008.

Tahun ini, pemerintah Afrika Selatan^[2] mengangkat tema utama “*Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan (Solidarity, Equality, and Sustainability)*” dan kembali memastikan ketimpangan sebagai agenda utama G20. Merujuk pada informasi G20 oleh Pemerintah Afrika Selatan, tema tersebut diturunkan ke dalam empat prioritas yaitu: (1) Memperkuat ketangguhan dan respon bencana melalui pentingnya bagi komunitas global termasuk lembaga keuangan internasional, bank pembangunan, dan sektor swasta untuk meningkatkan rekonstruksi setelah bencana; (2) Memastikan keberlanjutan utang bagi negara-negara berpendapatan menengah melalui solusi berkelanjutan mengatasi defisit struktural yang tinggi, tantangan likuiditas, serta memperluas keringanan utang bagi negara-negara berkembang.



Foto: Facebook/G20 South Africa

Afrika Selatan juga akan berupaya memastikan bahwa penilaian kredit negara (*sovereign credit rating*) dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani tingginya premi risiko bagi negara berkembang; (3) Mobilisasi pembiayaan untuk transisi energi yang berkeadilan mencakup penguatan lembaga keuangan pembangunan multilateral, peningkatan dan penyederhanaan dukungan terhadap platform negara seperti *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, serta pemanfaatan modal swasta secara lebih efektif; (4) Bekerja sama untuk memanfaatkan mineral strategis guna mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan, di mana pemanfaatan mineral strategis sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan di Afrika.

[2] Informasi lebih lanjut bisa dilihat di website <https://g20.org/about-g20/overview/>

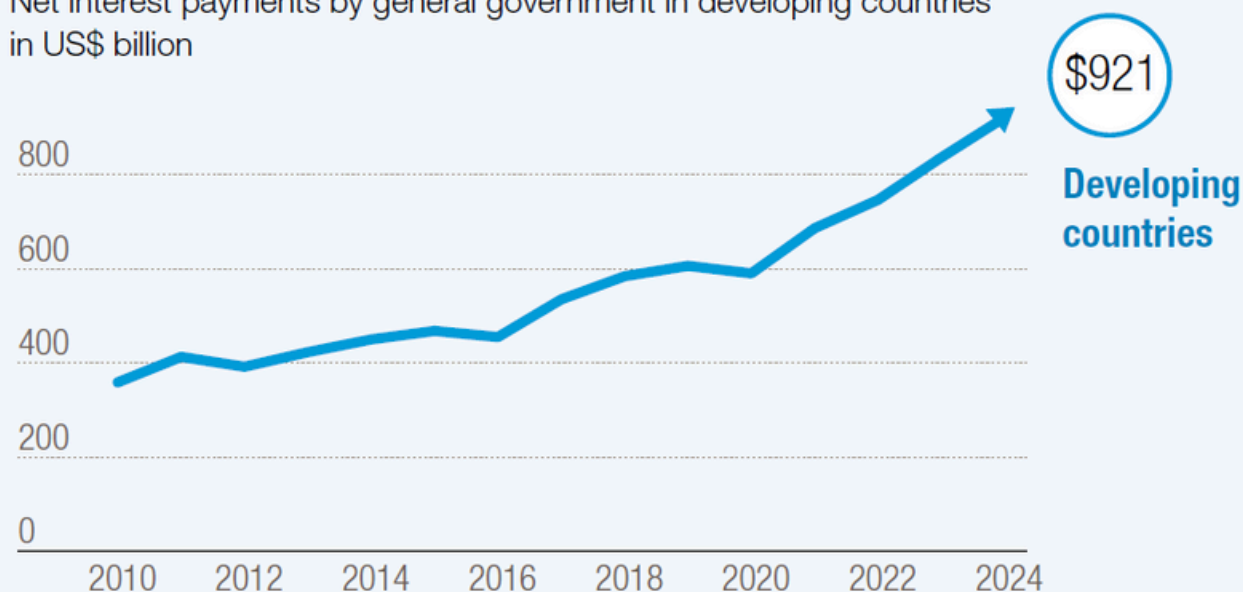
Harga Mahal Utang Luar Negeri

Dunia saat ini sedang dibayangi krisis akibat utang. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD)^[3] mencatat kenaikan utang pemerintah secara global mencapai USD 102 triliun di tahun 2024, meningkat USD 5 triliun dari tahun 2023. Nilai nominal utang negara berkembang meningkat dua kali lebih cepat dibandingkan negara maju. Namun demikian, negara maju masih menyumbang porsi terbesar dari total utang publik global, yaitu sekitar 69%, dengan utang negara berkembang sekitar 31% dari total utang publik global. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2010 sekitar 16%. Bahkan, Bank Dunia (2024)^[4] mencatat utang luar negeri negara berkembang di tahun 2023 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan dekade sebelumnya.

Figure 13

Developing countries pay a record US\$ 921 billion in interest.

Net interest payments by general government in developing countries in US\$ billion



Source: UNCTAD Secretariat calculations based on IMF World Economic Outlook (April 2025).

Note: Net interest payments of the general government refer to the total amount of domestic and external interest expenses incurred from loans and other forms of borrowing, minus any interest income received.

[3] Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://unctad.org/es/isar/publication/world-of-debt>

[4] Laporan Bank Dunia tahun 2024 dengan judul *International Debt Report*

Lebih lanjut, UNCTAD menggambarkan tingginya beban pembayaran utang karena biaya modal yang sangat mahal. Negara berkembang harus membayar bunga utang saja mencapai USD 921 miliar di tahun 2023, meningkat 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan bunga utang bahkan lebih tinggi dari kenaikan biaya pendidikan dan kesehatan (UNCTAD, 2025)^[5]. Contohnya, Afrika menghabiskan USD 70 per kapita untuk membayar bunga utang, lebih tinggi biaya yang dikeluarkan daripada biaya Pendidikan sebesar USD 63 per kapita dan kesehatan sebesar USD 44 per kapita.

Bukan hanya biaya modal yang sangat tinggi dengan tingginya beban bunga utang, komitmen pendanaan untuk perubahan iklim juga menjadi sumber utang baru. Laporan *Care Climate Justice* (2025) menyebutkan pendanaan iklim global masih jauh dari memadai dan berisiko menurun akibat rencana pemotongan bantuan pembangunan resmi atau *official development aid* (ODA). Pada 2022, pendanaan iklim publik diperkirakan mencapai USD 95,3 miliar, namun bisa turun menjadi 73 hingga 79 miliar dolar AS pada 2025, padahal kebutuhan tahunan mencapai 1 hingga 1,5 triliun dolar AS. Sekitar dua pertiga dari pendanaan tersebut berbentuk utang yang memperparah beban utang negara berkembang. Pendanaan untuk adaptasi hanya sekitar sepertiga dari total dan kemungkinan tidak mencapai target pelipatgandaan pada 2025, bahkan bisa turun menjadi 28 miliar dolar AS. Utang luar negeri Indonesia juga terus bertambah, salah satunya utang untuk pembiayaan perubahan iklim. Janji *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebesar USD 20 miliar, hingga kini belum jelas. Sementara itu, sebagian besar pendanaan JETP tersebut berupa utang luar negeri.

Tingginya beban biaya utang menjadi perhatian serius masyarakat sipil di Presidensi G20 tahun ini. Pada tanggal 14 Oktober 2025, INFID bersama dengan 165 masyarakat sipil dari berbagai negara mengirimkan surat kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa selaku Presidensi G20 tahun ini. Organisasi masyarakat sipil dan gerakan keadilan utang global menyerukan tindakan nyata di bawah kepemimpinan Afrika Selatan untuk mengatasi krisis utang yang semakin parah di negara-negara Selatan, terutama di Afrika.

[5] Care Climate Justice, 2025. Climate Finance Shadow Report 2025 “Analyzing progress on Climate Finance under the Paris Agreement”

Masyarakat sipil menyoroti negara-negara berkembang menghadapi beban utang yang tidak berkelanjutan, biaya pinjaman tertinggi dalam dua dekade, dan pembayaran bunga yang menggerus anggaran untuk kesehatan, pendidikan, serta pembangunan. Meskipun G20 telah memiliki *Common Framework*, mekanismenya dinilai lambat, tidak adil, dan belum mampu memulihkan keberlanjutan fiskal. Surat tersebut mendesak Afrika Selatan untuk memperjuangkan reformasi arsitektur keuangan global melalui pembentukan *UN Framework Convention on Sovereign Debt*, reformasi proses restrukturisasi utang yang lebih cepat dan dalam, pendirian *African Credit Rating Agency* dan *Global Debt Registry*, pembentukan *Borrowers Club* bagi negara-negara debitur, serta penetapan prinsip pinjaman dan peminjaman yang bertanggung jawab. Selain itu, mendorong penjualan cadangan emas IMF untuk dana keringanan utang dan penghapusan utang yang tidak berkelanjutan.

Tingginya biaya utang ini menimbulkan masalah. Bukan lagi '*miliar menjadi triliun*', di mana utang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, menggerakkan perekonomian nasional, dan mendorong kenaikan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, miliar menjadi triliun dalam bentuk pengembalian utang dan bunga utang. Dalam salah satu presentasinya^[6], Dr. Bhumika Muchala dari Third World Network, menjelaskan terjadi '*millions in*' dan '*billions out*', yang berarti negara-negara berkembang menerima utang bernilai jutaan, namun harus membayar lebih besar hingga miliar USD. Lebih lanjut, Muchala menggambarkan sejak pandemi Covid, sektor swasta telah mengumpulkan sekitar USD 68 miliar per tahun dari pembayaran bunga utang dan utang pokok yang diberikan ke negara berkembang.

Lembaga keuangan internasional dan lembaga bantuan mengekstraksi tambahan dana sebesar USD 40 miliar, sementara bantuan konsesional bersih yang diberikan hanya sekitar 2 miliar dolar AS, meskipun kelaparan, perang, dan bencana iklim semakin parah. Slogan "*billions to trillions*", sebuah rencana besar lembaga keuangan internasional dan PBB untuk memobilisasi modal sektor swasta bagi pembangunan di negara-negara *Global South*, kini justru berubah menjadi realitas pahit: *millions in, billions out*.

[6] Regional workshop on Green Industrial Policy in Southeast Asia, 25 to 27 August 2025

Pengentasan Kemiskinan Kian Lambat, dan Ketimpangan Semakin Lebar

Saat utang meningkat dan terus menumpuk hingga berlipat ganda, penurunan kemiskinan kian lambat dan ketimpangan global kian lebar. Bank Dunia (2025) melaporkan, jumlah penduduk miskin dunia yang hidup kurang dari 3 dollar USD per hari atau Rp 546,000 per orang per bulan berjumlah 831 juta orang. Tujuan SDGs yang manargetkan tahun 2030 tidak ada lagi orang miskin, terancam gagal^[7].

Bank Dunia memperkirakan jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2024 mencapai 68,3% atau 194,7 juta penduduk berdasarkan pada indikator kemiskinan baru, yaitu 8,30 dollar USD per hari atau Rp 1,512,000 per orang per bulan. Angka ini jauh dari jumlah penduduk miskin berdasarkan pada perhitungan pemerintah, yaitu 3 dollar USD per hari atau Rp 546,400 per bulan per orang yang mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57% di periode yang sama.

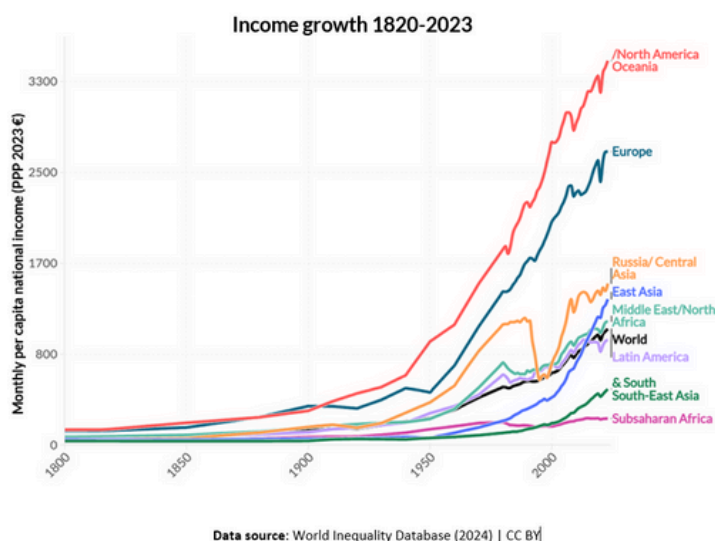


Keterangan: Ilustrasi ketimpangan. (Foto: Canva)

[7] Laporan pencapaian SDGs pada April 2023 menyebutkan 12% target SDGs yang berada di jalur yang benar, 50% kemajuan masih lemah dan tidak memadai, dan lebih dari 30% target mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran di tingkat global.

Lambatnya penurunan kemiskinan sejalan dengan melebarnya ketimpangan baik antarnegara maupun di dalam negara. Merujuk pada laporan OXFAM (2025)^[8], total kekayaan miliarder tumbuh tiga kali lipat di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, di mana 60% kekayaan miliarder berasal dari warisan, jaringan kekerabatan, dan atau kekuasaan terpusat. Lebih lanjut, laporan yang sama menyebut pemerintah negara-negara Selatan membayar 3,3 triliun USD kepada kreditor di negara Utara antara tahun 1970 hingga 2023. Korporasi internasional mengembalikan 1 triliun USD keuntungan dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi. Lebih lanjut, negara berpendapatan rendah kehilangan pendapatan dari pajak sebesar 47 miliar USD akibat penyalahgunaan pajak.

Kue pertumbuhan ekonomi global hanya bertumpu di kawasan tertentu. Laporan World Inequality di tahun 2024^[9] menunjukkan, tingkat pertumbuhan riil pendapatan nasional per kapita jangka panjang dunia mencapai rata-rata 1,3% per tahun antara tahun 1800 hingga 2023. Pertumbuhan ini cukup untuk meningkatkan pendapatan rata-rata global lebih dari 18 kali lipat dalam dua abad terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut tidak merata. Negara-negara Barat melampaui rata-rata global sejak abad ke-19, sementara Afrika Sub-Sahara serta Asia Selatan dan Asia Tenggara tertinggal.



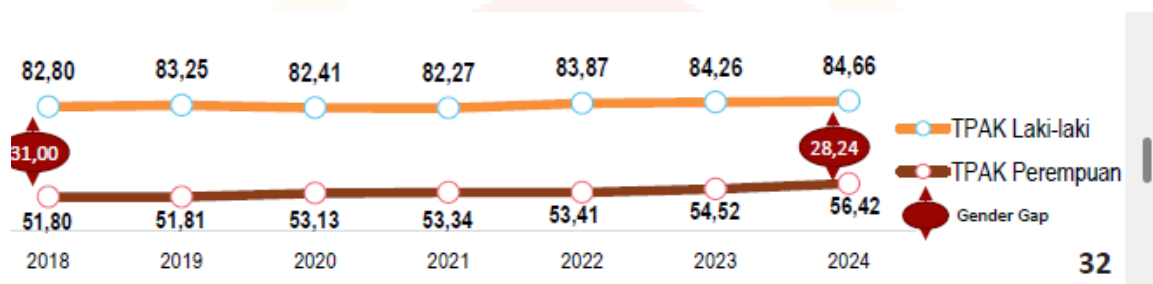
Data-data tersebut sungguh menyedihkan di saat negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi tantangan pembangunan yang kian berat. Kemiskinan mendalam, diiringi dengan sedikitnya lapangan kerja akibat ketidakmampuan negara dalam membangun industrinya, hingga minimnya infrastruktur dasar.

Semua masalah berkelindan dengan minimnya anggaran yang dimiliki, namun di saat yang sama menanggung tingginya beban utang.

[8] OXFAM, 2025. Takers not Makers, the Unjust Poverty and Unearned Wealth of colonialism.

[9] World Inequality Database, 2024. <https://wid.world/news-article/10-facts-on-global-inequality-in-2024/>

Situasi ketimpangan di dalam negeri tidak kalah mengkhawatirkan. Meskipun rasio gini^[10] menunjukkan penurunan, namun ketimpangan masih menjadi persoalan serius. OXFAM (2024)^[11] di dalam laporan berbeda menyebutkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan ketimpangan masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan indeks yang dikembangkan mengacu pada tiga hal yaitu; (1) Layanan publik berkaitan dengan anggaran untuk Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial; (2) Kebijakan pajak; dan (3) Pemenuhan hak-hak pekerja seperti upah layak maupun hak berserikat, menunjukkan komitmen Indonesia di tahun 2024 berada pada peringkat 105 dari 164 negara, menurun dibandingkan tahun 2020 yang berada di peringkat 93 dari 158 negara.



Sumber: BPS, 2025

Indonesia juga menghadapi ketimpangan gender yang dalam. Pada banyak hal, perempuan jauh tertinggal. Dalam tujuh tahun, tingkat partisipasi kerja perempuan sekitar 50%, jauh di bawah partisipasi kerja laki-laki, yaitu sekitar 80%. Perempuan juga banyak bekerja di sektor informal, menjadi penopang perekonomian, minim pengakuan, dan tiadanya perlindungan, dengan upah jauh dari layak. Belum lagi partisipasi perempuan di politik, yang kian jauh dari harapan.

Tanggung Jawab G20 Mengatasi Krisis Utang

Peran G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional dengan prinsip pertumbuhan yang kuat, inklusif, berkelanjutan, dan seimbang, terancam tidak memiliki relevansi karena ketidakmampuannya menyelesaikan masalah ekonomi struktural dan keuangan yang diakibatkan oleh utang. Krisis berulang akibat gagalnya negara mengatasi krisis tersebut. Oleh karena itu, sejumlah langkah, penting dilakukan di antaranya sebagai berikut.

[10] Data yang perlu terus dikaji mengingat basis datanya adalah pendapatan bukan kekayaan. Sehingga ada kemungkinan rasio gini tidak benar-benar menggambarkan situasi ketimpangan yang sesungguhnya.

[11] OXFAM, 2024. The commitment to reducing inequality index 2024.

Pertama, perjas komitmen G20 dalam penghapusan utang bagi negara berpendapatan menengah dan rendah, dengan:

- Meningkatkan cakupan *G20's Common Framework for Debt Treatment* terutama dalam beberapa hal berikut: (a) memperkuat kerangka kerja bersama agar lebih prediktif, tepat waktu, dan terkoordinasi. Perlu adanya integrasi restrukturisasi utang selama negosiasi, serta perluasan cakupan ke negara berpenghasilan menengah dan rendah sejalan dengan rekomendasi Konferensi ke-4 Pembiayaan untuk Pembangunan; (b) melibatkan kreditor swasta dan bank pembangunan multilateral. Hal ini untuk memastikan kreditor swasta dan MDBs memiliki komitmen penghapusan utang; (c) Meningkatkan skala penghapusan utang dimana saat ini dengan 12% dari pembayaran utang jatuh tempo dianggap sangat kecil.
- G20 meningkatkan alokasi *Special Drawing Rights (SDRs)*, serta memastikan penggunaannya fokus pada pengentasan kemiskinan, transisi energi yang adil, dan pembangunan sosial. Mengurangi persyaratan penghematan yang membatasi layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan SDR, serta menekankan pentingnya partisipasi dan penguatan kapasitas teknis negara berpendapatan menengah dan rendah.
- Mereformasi lembaga-lembaga pemeringkatan (*credit rating agency*) yang bias dengan kepentingan negara berpendapatan tinggi.

Kedua, memastikan reformasi struktural lembaga keuangan internasional, terutama lembaga keuangan Bretton Woods^[12] sejalan dengan agenda pembangunan negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Reformasi tersebut meliputi penguatan peran negara-negara Selatan, mencakup modernisasi struktur dewan, revisi aturan kuota dan hak suara, serta pelonggaran akses terhadap sumber daya agar tidak semata bergantung pada formula kuota yang kaku. Menciptakan kerangka restrukturisasi utang yang lebih kuat dengan melibatkan kreditor swasta dan mempertimbangkan keringanan utang. Meningkatkan instrumen likuiditas dan koordinasi regional untuk memperkuat stabilitas ekonomi, sekaligus memastikan Bank Dunia dan IMF mendorong kerja sama perpajakan global yang lebih inklusif di bawah naungan PBB. Hal ini penting untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba oleh korporasi multinasional, dan memastikan sistem pajak global lebih adil.

[12] Lembaga keuangan Bretton Woods adalah Bank Dunia dan IMF yang berdiri di tahun 1944 di Kota Hemisphere, Amerika Serikat. Lembaga keuangan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk rekonstruksi dan Pembangunan akibat perang dunia ke-2, sekaligus menjaga neraca berjalan.

Ketiga, mempersempit aliran dana keluar dari negara-negara berpendapatan menengah dan bawah ke negara-negara maju melalui sistem pajak yang adil.

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan di antaranya memastikan sistem pajak inklusif dengan partisipasi semua negara melalui pembentukan *United Nations Tax Conventions*. Mendukung usulan Pemerintah Brazil untuk menerapkan pajak bagi orang-orang super kaya. Memastikan hasil Konferensi Pembiayaan untuk Pembangunan ke-4 yaitu pajak dibayarkan dimana keuntungan dihasilkan, bukan dimana Perusahaan didaftarkan dan ini berlaku di semua negara. Dan menghindari praktek bekerja ke bawah (*race to the bottom*) dengan menerapkan pajak minimum korporasi 25%, bukan 15% yang disepakati di G20.

Keempat, memperkuat kebijakan industri di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah.

Industri yang dimaksud adalah industri yang tumbuh berdasarkan atas sumber daya dari masing-masing negara, berkembang dengan teknologi yang ramah lingkungan, memberi ruang bukan hanya sektor-sektor produksi namun juga reproduksi seperti *care economy*, dikelola dengan cara dan pendekatan yang demokratis dan tidak ekstraktif. Sehingga ekonomi memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat terutama kelompok rentan dan terpinggirkan akibat sistem ekonomi yang rakus dan serakah. Oleh karena itu, G20 perlu kembali memperkuat komitmennya akan pentingnya keseimbangan global, dengan tumbuhnya model-model baru industri yang tidak ekstraktif dan eksploitatif.

Sejumlah langkah tersebut penting dilakukan untuk menjawab masalah struktural yang dialami dunia. Tanpa adanya keseriusan G20 untuk mengurangi praktek-praktek yang tidak adil dalam arsitektur keuangan global, maka krisis utang akan terus terjadi. Hal ini akan menghambat hak negara-negara berpendapatan menengah dan rendah untuk menikmati pembangunan yang mensejahterakan rakyatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks ketimpangan gender 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/31/83ae68c36720895d3895ec58/indeks-ketimpangan-gender-2024.html>

Care Climate Justice. (2025). Laporan pendanaan iklim global. <https://www.careclimatejustice.org/reports/2025>

International Labour Organization. (2023). Global wage report 2024-25: Is wage inequality decreasing globally? <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/global-wage-report-2024-25-wage-inequality-decreasing-globally>

Muchala, B. (2022, May 2). Statement by Bhumika Muchhala, Third World Network, on behalf of the CS FfD Group [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZcDsNWeFE>

Oxfam International. (2024). The commitment to reducing inequality index 2024. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2024-621653/>

Oxfam International. (2025). Takers not makers: The unjust poverty and unearned wealth of colonial inheritance. <https://www.oxfam.org/en/research/takers-not-makers>

Pemerintah Afrika Selatan. (2025). G20 South Africa Presidency priorities: Solidarity, equality, and sustainability. <https://g20.org/g20-south-africa/g20-presidency/>

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). A world of debt 2025. <https://unctad.org/publication/world-of-debt>

World Bank. (2024). International debt report 2024. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/12/03/developing-countries-paid-record-1-4-trillion-on-foreign-debt-in-2023>

World Bank. (2025a). June 2025 update to global poverty lines. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/05/june-2025-update-to-global-poverty-lines>

World Bank. (2025b). The updated global poverty lines: Indonesia. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>

World Inequality Lab. (2024). 10 facts on global inequality in 2024. <https://wid.world/news-article/10-facts-on-global-inequality-in-2024/>

TENTANG INFID

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

-  **Instagram:** infid_id
-  **Twitter:** infid_id
-  **Facebook:** Infid
-  **Linked In:** Infid
-  **YouTube:** INFID TV
-  **Website:** www.infid.org





NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

.....
Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

